The current issue and full text archive
of this journal is available on Tarbawi at:
https://journal.itsnupasuruan.ac.id/index.php/tarbawi

E-ISSN : 2502-4353, P-ISSN : 2598-4128

Tarbawi
Journal Studi Pendidikan Islam

SISTEM PENDIDIKAN SD AL-ANWAR KOTA PASURUAN: SEBUAH SISTEM GABUNGAN ANTARA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI

Nursaman [1]

[1]Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Salahuddin Pasuruan, Indonesia;
e-mail: nursaman@staispasuruan.ac.id

Abstract :

The issue of decentralization refers to the extent to which authority has been delegated, authority from one level of management to the next level of management that is below it, while centralization is the opposite or remains held at the top level. The issue here is not whether an organization must decentralize, but to what extent it is decentralized. For example, basic education management tends towards centralization or decentralization. Or even a combination of centralization and decentralization. Let's take the example of the case of basic education management in an Islamic boarding school environment. Private basic education institutions that implement a combination of centralized and decentralized systems, one of which is AlAnwar Elementary School, Pasuruan City, which in certain parts such as additional curriculum and operational implementation implements both decentralization and centralization.

Keywords : *Islamic education, centralization and decentralization*

TARBAWI :
Jurnal Studi Pendidikan Islami
Vol 11 No 1 April 2023

Hal. 24-32

https://doi.org/10.55757/tarbawi

Received: 13 Februari 2023
Accepted: 01 Maret 2023
Published: 10 April 2023

Publisher's Note: Pusat Penelitian dan Pengembangan (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin (STAIS) Pasuruan, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

1. Pendahuluan

. Kita telah mengenal bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri atas program enam tahun di Sekolah Dasar dan program pendidikan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, seperti SMP. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota

masyarakat, warga Negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Bentuk satuan pendidikan dasar Sembilan tahun itu diatur oleh Menteri Pendidikan. Sedangkan bentuk satuan pendidikan dasar yang beciri khas agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah tetap juga diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama.

Berangkat dari pernyataan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar merupakan legitimasi pemerintah pusat atau sentralisasi. Sementara desentralisasi manajemen pendidikan dasar dapat diartikan pengurangan legitimasi pemerintah pusat meskipun tidak seharusnya demikian (Tilaar, 2008).

2. Landasan Teori

Dalam dikhotomi pemikiran desentralisasi-sentralisasi manajemen pendidikan dasar, (Tilaar, 2008).mengemukakan 7 unsur yang merupakan poros penentu perumusan strategi pengelolaan. Ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wawasan nusantara dalam wadah Negara kesatuan.
b. Asas demokrasi sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
c. Pengembangan kurikulum mengacu kepada pembangunan nasional serta syarat-syarat teknis kependidikan
d. Proses belajar dan mengajar
e. Efisiensi dari sistem pendidikan, dalam hal ini jenjang pendidikan dasar.
f. Pembiayaan.
g. Ketenagaan kependidikan, termasuk pengelola, guru, pustakawan, teknisi sumber belajar, laporan, pemilik/pengawas, peneliti dan pengemban, serta penguji.

Untuk lebih jelasnya kita analisi masing-masing aspek tersebut dengan mengkaji kelebihan dan kelemahannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Nanang (Fattah, 2009) sebagai berikut:

a. Wawasan nusantara

Sentralisasi meliputi; 1) Memperkuat rasa kebangsaan dan meningkatkan kohesi nasional; dan 2) Memperkuat wibawah pemerintahan nasional.

Desentralisasi meliputi; 1) Dapat memperlemah persatuan dan kesatuan nasional; 2) Dapat mengarah kepada rasa ke daerah yang sempit; 3) Dapat mengurangi wibawah pemerintah secara nasional; dan 4) Sebaliknya dapat mengurangi konflik antara pusat dan daerah (konflik manajemen)

b. Demokrasi

Sentralisasi meliputi; 1) Memperlambat proses demokrasi; 2) Organisasi kuat, tetapi kaku; 3) Kurang partisipasi/pasif, kurang inisiatif; dan d) Cenderung ke arah penyemarataan.

Desentralisasi meliupti; 1) Proses demokrasi berjalan secara partisipasi nyata; 2) Memerlukan organisasi yang fleksibel dan merata di seluruh daerah; dan 3) Memupuk kemandirian.

c. Kurikulum

Sentralisasi meliputi: 1) Mudah dicapai consensus; 2) Sulit diadaptasi pada kebutuhan lingkungan; 3) Memelihara budaya nasional; dan 4) Sangat membantu dalam perluasan kesempatan belajar dan mudah mengadakan inovasi.

Desentralisasi meliputi: 1) Sulit dicapai consensus dalam merumuskan tujuan pendidikan karena keragaman kebutuhan; 2) Dapat beradaptasi kepada tuntutan lingkungan sosial, dan budaya masyarakat; dan 3) Relatif sulit mengadakan eksperimen yang berwawasan nasional.

d. Proses Belajar Mengajar

Sentralisasi meliputi: 1) Kecenderungan intelektualistik; 2) Belajar abstrak, tanpa pengalaman lingkungan; dan 3) Evaluasi sebagai alat standarisasi, dan media legitimasi pusat.

Desentralisasi meliputi: 1) Sangat kondusif untuk PBM; 2) Sulit menerapkan standar nasional ketidaksamaan mutu sangat nyata; dan 3) Di pihak lain, pengawasan lebih efektif.

e. Efisiensi

Sentralisasi meliputi: 1) Condong bersifat makro sehingga menyebabkan kesenjangan dalam kebutuhan tenaga terampil; dan 2) Cenderung meningkatkan tinggal kelas yang mengakibatkan pemborosan.

Desentralisasi meliputi: 1) Antara penawaran dan permintaan tenaga kerja relative ada kesesuaian; 2) Cenderung mengurangi tinggal kelas karena kurikulum yang relevan; dan 3) Sangat efisien dalam menggunakan sumber-sumber.

f. Pembiayaan

Sentralisasi yaitu sulit menjaring dan memadukan sumber-sumber daya pendidikan dalam masyarakat.

Desentralisasi yaitu dapat memobilisasi sumberdaya pendidikan, asal disertai partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

g. Ketenagaan

Sentralisasi yaitu ketenagaan disediakan pusat, sehingga kemungkinan ada kesulitan dalam penyebarannya. Akhirnya dapat mengakibakan pemborosan.

Desentralisasi yaitu relatif dapat dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan nyata, termasuk untuk daerah terpencil. Bertolak dari uraian di atas, maka gambaran tentang manajemen pendidikan dasar di Indonesia masih dualisme, atau mungkin lebih jika dilihat dari berbagai sumber dana untuk pembiayaan pendidikan. Akan tetapi kedua jenis pendekatan manajemen itu tidak bertentangan satu dengan yang lain, malah saling mengisi. Kedua pendekatan manajemen pendidikan itu masing-masing mempunyai kekuatan dan kelebihan bergantung pada situasi dan kondisi tahap pembangunan serta syarat-syarat obyektif lainnya yang dalam ilmu manajemen disebut “managerial environment”.

Akan tetapi dalam praktiknya manajemen yang tampak dalam masyarakat di Negara kita ialah cenderung kepada sentralisme yang berlebihan dengan berbagai sistem petunjuk, pengarahan, sampai kepada restu-restuan. Praktik semacam ini jelas kurang sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat sekarang yang semakin rasional, semakin kompetitif, sehingga pendekatan manajemen yang transparan sangat diperlukan untuk membuka berbagai kesepakatan untuk maju.

Mengenai konsep sentralisasi, antropolog Mattulada sebagaimana dikutip (Tilaar, 2008) mempunyai observasi sebagai berikut:

Manajemen pembangunan yang amat sentralistik dikendalikan oleh kaum profesional, sehingga sulit diharapkan untuk berorientasi kepada rakyat, karena mereka dibayar oleh penguasa capital. Semua itu terjadi karena sejak semula pembangunan memang tidak "dari rakyat", dan akhirnya bukan hanya tidak "untuk rakyat", tetapi juga tidak "oleh rakyat". Keadaan seperti inilah yang menjadi sumber yang amat menekan makna partisipasi rakyat dalam pembangunan. Pembangunan "oleh orang lain", dan "orang lain" itu akhirnya menjelma menjadi "orang asing" yang tidak membawa kedamaian dalam masyarakat.

Selanjutnya Mattulada mengatakan bahwa pembangunan nasional (dalam hal ini pembangunan pendidikan) haruslah dikembangkan dari asas otonomi yang mendorong prakarsa, kreativitas dari sumbernya yang terletak di dalam wilayah pembangunan sendiri. Dalam mengembangkan sistem manajemen pembangunan ini selalu perlu disadari akan makna dari pembangunan nasional itu sendiri, yaitu pembangunan manusia Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan yang berwawasan nasional perlu selalu menjadi pedoman dalam pembangunan manajemen kita. Hal ini berarti bahwa akan ada proses polarisasi antara pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi manajemen pembangunan, termasuk dalam pengembangan manajemen pendidikan dasar.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pendekatan manajemen pendidikan yang desentralisasi merupakan jalan terbaik untuk mencapai pendidikan yang semakin bermutu, relevan, efektif dan efisien. Hal ini berpihak kepada kebijakan pembangunan nasional, yaitu lebih mendekatkan pembangunan kepada rakyat. Berkaitan dengan itu telah lahir Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II, tentunya khusus dalam manajemen pendidikan, perlu dipertimbangan kondisi daerah yang didesentralisi penuh dan ada yang perlu dipersiapkan lebih. Namun demikian tidak mudah untuk melakukan desentralisasi, karena banyak kendala, yang di antaranya adalah keengganan bawahan untuk menerimanya. Bahkan dalam Undang Undang

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, manajemen pendidikan dasar masih relative tetap lebih menonjol bersifat sentralisasi meskipun ada bagian-bagian tertentu yang bersifat desentralisasi misalnya lembaga pendidikan dasar swasta dalam pelaksanaan operasionalnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Salah satu contoh pendidikan dasar swata yang bersifat sentralisasi dan bagian-bagian tertentu yang bersifat desentralisasi dalam pelaksanaan operasionalnya adalah Sekolah Dasar al-Anwar Kota Pasuruan yang berdiri pada tahun 2012, di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren As-Salafiyah Pasuruan dan Masjid Agung Al-Anwar Kota Pasuruan. Alamat lokasi SD ini di Jalan KH Wahid Hasyim 169 Kota Pasuruan.

Visi yang dicanangkan oleh SD Al-Anwar ini dalam perannya sebagai lembaga pendidikan dasar adalah pembentukan karakter dasar keislaman yang berhaluan Ahlussunnah Waljamaah dan kebangsaan serta pengembangan kecendikiaan anak yang berakhlakul karimah. Kemudian berdasarkan Visi tersebut, maka misi SD Al-Anwar adalah menyelenggarakan pendidikan karakter keislaman dan kebangsaan dalam rangka hal-hal sebagai berikut: 1) Menumbuhkan ketaatan kepada Allah SWT dan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya; 2) Menumbuhkan rasa bakti kepada kedua orang tua, guru, dan rasa cinta kepada diri sendiri, bangsa dan negara serta sesama lingkungan; dan 3) Menumbuhkan ilmu pengetahuan dasar dalam rangka menghasilkan lulusan yang siap untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama, di samping menumbuh kembangkan kecendekiaan yang berakhlakul karimah.

SD Al-Anwar menggunakan sistem pembelajaran full-day school dari hari Senin sampai dengan jum'at. Hari Senin sampai Jumat para murid belajar mulai pukul 06.30-15.00 WIB. Sistem pembelajaran full-day school ini dilakukan untuk menjembatani keinginan Ta'mir Masjid Agung dan masyarakat atau orang tua murid agar anak berada dalam lingkungan pendidikan dan terhindar dari pengaruh pergaulan hidup yang tidak diinginkan. Pembelajaran didasarkan pada Kurikulum tahun 2013, dengan istilah lain disebut "Kurikulum Tematik", yang dikembangkan

dengan merujuk pada standar kompetensi lulusan dan Standar isi Sekolah yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, di samping dikembangkan dengan kurikulum muatan lembaga Yayasan/Masjid Agung Al-Anwar Kota Pasuruan untuk pendidikan Al-Quran dan pendidikan karakter ke-Islaman ala Ahlu Sunnah Waljama'ah. Adapun pola pembelajaran yang dikembangkan adalah pembelajaran tuntas (master learning), artinya pembelajaran secara individual tuntas, dan karena itu meniadakan pekerjaan rumah (PR). Untuk laporan akuntabilitas pendidikan, setiap bulan disampaikan laporan akademik dan karakter murid kepada wali murid.

SD Al-Anwar mempersiapkan para murid agar bangga atas identitas ke-Islamannya yang berhaluan Ahlussunnah Waljamaah, melalui pembelajaran pendidikan dasar agama dan Al-Quran setiap hari dengan target kelas IV murid dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan benar yang ditandai dengan sertifikat tashih Al-Quran, dan sampai dengan kelas VI para murid sudah hafal juz Amma (juz 30). Meski target hafalan juz 30, namun ada juga para siswa yang relatif hafal 2 juz atau 3 juz yaitu juz 28, 29, dan 30. Di samping itu SD Al-Anwar mempersiapkan program pembiasaan salat wajib berjamaah pada waktu salat dhuha, dan salat dhuhur, bacaan aurad dan dzikir serta doa-doa yang lazim dipakai di masjid tersebut.

Berangkat dari uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa lembaga SD Al-Anwar Kota Pasuruan adalah pendidikan dasar swata yang bersifat sentralisasi namun bagian-bagian tertentu yang cenderung bersifat desentralisasi dalam pelaksanaan operasional dan kurikulum tambahan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan operasional menggunakan manajemen dengan system gabungan antara desentralisasi dan sentralisasi di SD Al-Anwar tersebut.

4. Kesimpulan

Secara garis besar dapat dimengerti bahwa manajemen pendidikan dasar bukan merupakan masalah kecil dan tidak dapat diletakkan dalam dikhotomi yang relatif sederhana, masing-masing pendekatan apakah itu desentralisasi ataukah

sentralisasi, bahkan mungkin gabungan antara kedua sistem tersebut, yang mempunyai kekuatan dan kelemahannya.

Berangkat dari uraian tersebut, perlu dirumuskan kembali indikator-indikator penting manakah dari kedua sistem sentralisasi dan desentralisasi yang masih dipertahankan untuk tetap dilaksanakan bagi pendidikan nasional utamanya pendidikan dasar sehingga muncul penggabungan dan sekaligus penyempurnaan dari kedua sistem itu menjadi satu sistem manajemen pendidikan dasar.

Lembaga pendidikan dasar swasta yang menerapkan gabungan antara sastem sentralisasi dan desentralisasi, salah satunya adalah SD AlAnwar Kota Pasuruan, yang dalam bagian-bagian tertentu seperti kurikulum tambahan dan pelaksanaan operasionalnya menerapkan desentralisasi dan sekaligus juga sentralisasi.

Referensi

Mulyasa, "Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013". Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (2014).

Nanang, Fattah, "Landasan Manajemen Pendidikan". Bandung: Rosdakarya. (2009).

Owens, Robert G. "Organizational Behavior In Education (Jurnal Internasional)". New Jersey: Englewood Cliffs. (1987).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Manajemen Pendidikan Dasar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Tilaar, H.A.R. "Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung": PT Remaja Rosdakarya. (2008).

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

World Bank. "Indonesia Basic Education Study". Report No. 7841-IND, 22 Desember (1989).